

**"Pemda jangan  
cuma andalkan duit  
pusat"**

Jalankan Vaksinasi, Sri Mulyani Minta Pemda Tidak  
Cuma Andalkan Duit dari Pusat



**Sri Mulyani**

Menteri Keuangan

Sumber gambar dan perita: <https://ekbis.sindonews.com/read/306510/33/jalankan-vaksinasi-sri-mulyani-minta-pemda-tidak-cuma-andalkan-duit-dari-pusat-1611039699>



KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

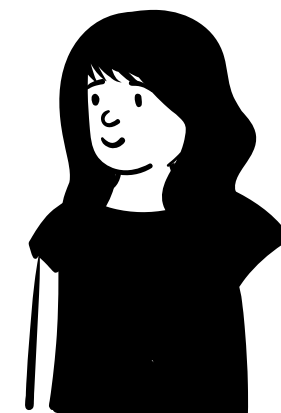
# Sayembara Bedah Data APBD **Sinergi APBD Antarprovinsi: Vaksin untuk Indonesia**

Road to Final

25 Mei 2021

Fransiska Citra Mariana

Process Engineer  
PT Pertamina Hulu Mahakam



Fajar Seno Adi

Senior Auditor  
RSM Indonesia



Kartika Rizqi Nastiti

Software QA Engineer  
PT Jejaring Makanan Indonesia



Zoraidha Aulia

Marketing Data Analyst  
PT Blue Gaz Indonesia

# Latar Belakang

**1** Dalam menangani covid pemerintah perlu mengalokasikan dana untuk vaksin nasional

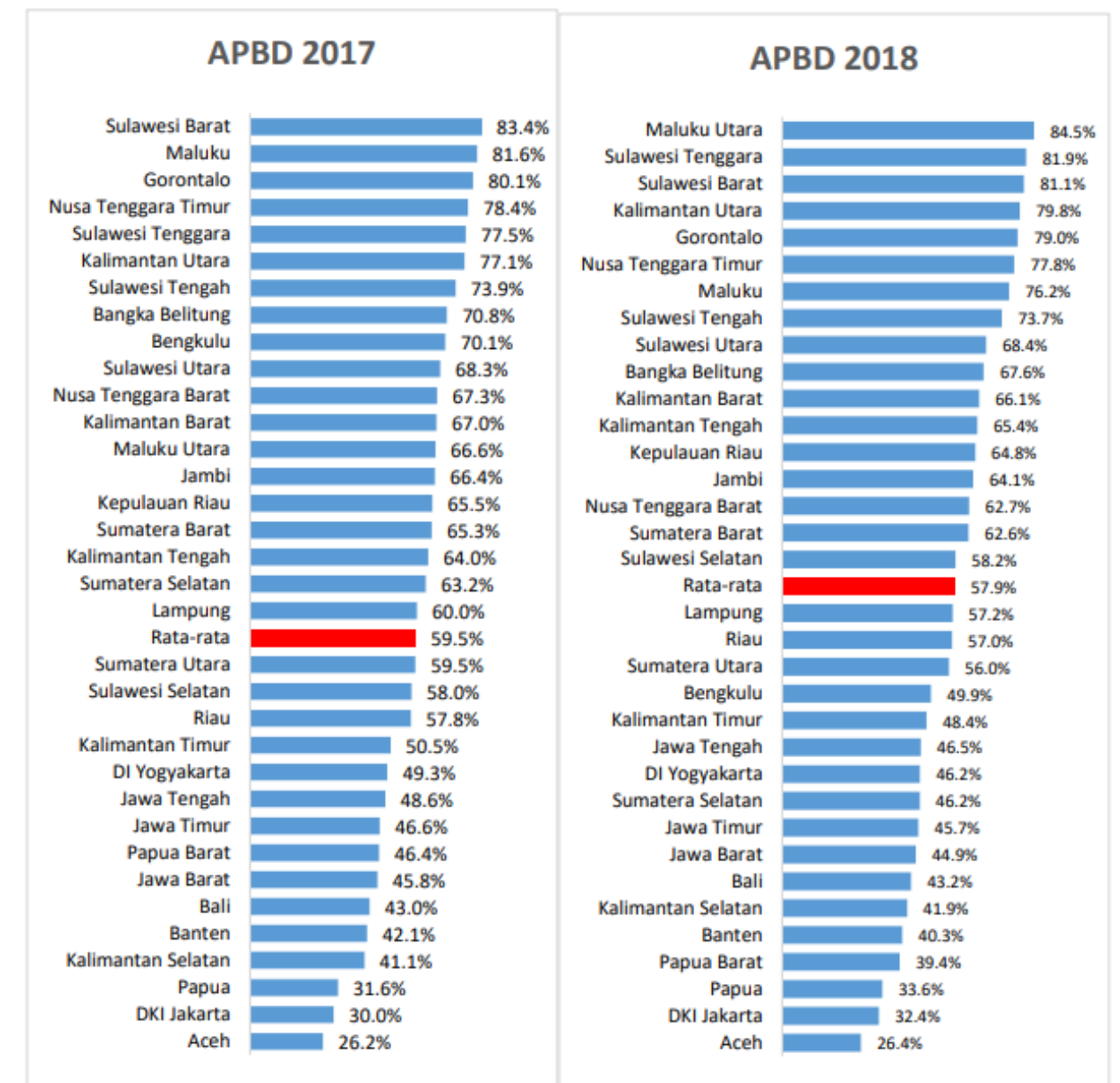
**2** Dukungan pendanaan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sebesar persentase tertentu dari alokasi DAU TA 2021 atau sesuai kebutuhan dengan memperhatikan jumlah penduduk dan jangkauan wilayah distribusi vaksin

Sumber: Poin-poin KMK yang mengatur mengenai earmarking DAU atau DBH untuk dukungan program pelaksanaan vaksinasi Covid-19

**3** DAU/DAK merupakan komponen terbesar dana perimbangan. Provinsi-provinsi Indonesia Timur Punya ketergantungan tinggi pada DAU/DAK

Sumber: Ringkasan APBD TA-2018

Rasio Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan antar Provinsi



Sumber: Ringkasan APBD TA-2018

# Tujuan dan Manfaat

- 1 Panduan pemerintah daerah dalam mengalokasikan DAU yang tersedia untuk pengadaan vaksin minimal untuk provinsi masing-masing agar suatu daerah mencapai herd immunity
- 2 Strategi untuk daerah-daerah dengan ketergantungan lebih tinggi ke dana transfer dari pusat.
  - Apakah dengan pemotongan lebih besar?
  - Apakah dengan subsidi dari daerah yang punya independensi lebih tinggi?

# Analisis Data

**1** Menentukan daerah-daerah dengan kecenderungan independensi tinggi terhadap dana dari pusat

**2** Memperkirakan kebutuhan anggaran untuk biaya vaksin tiap daerah

- Kekebalan kelompok 70% populasi
- Data penduduk 2021 berdasarkan hasil sensus BPS 2019
- Vaksin Sinovac dua dosis

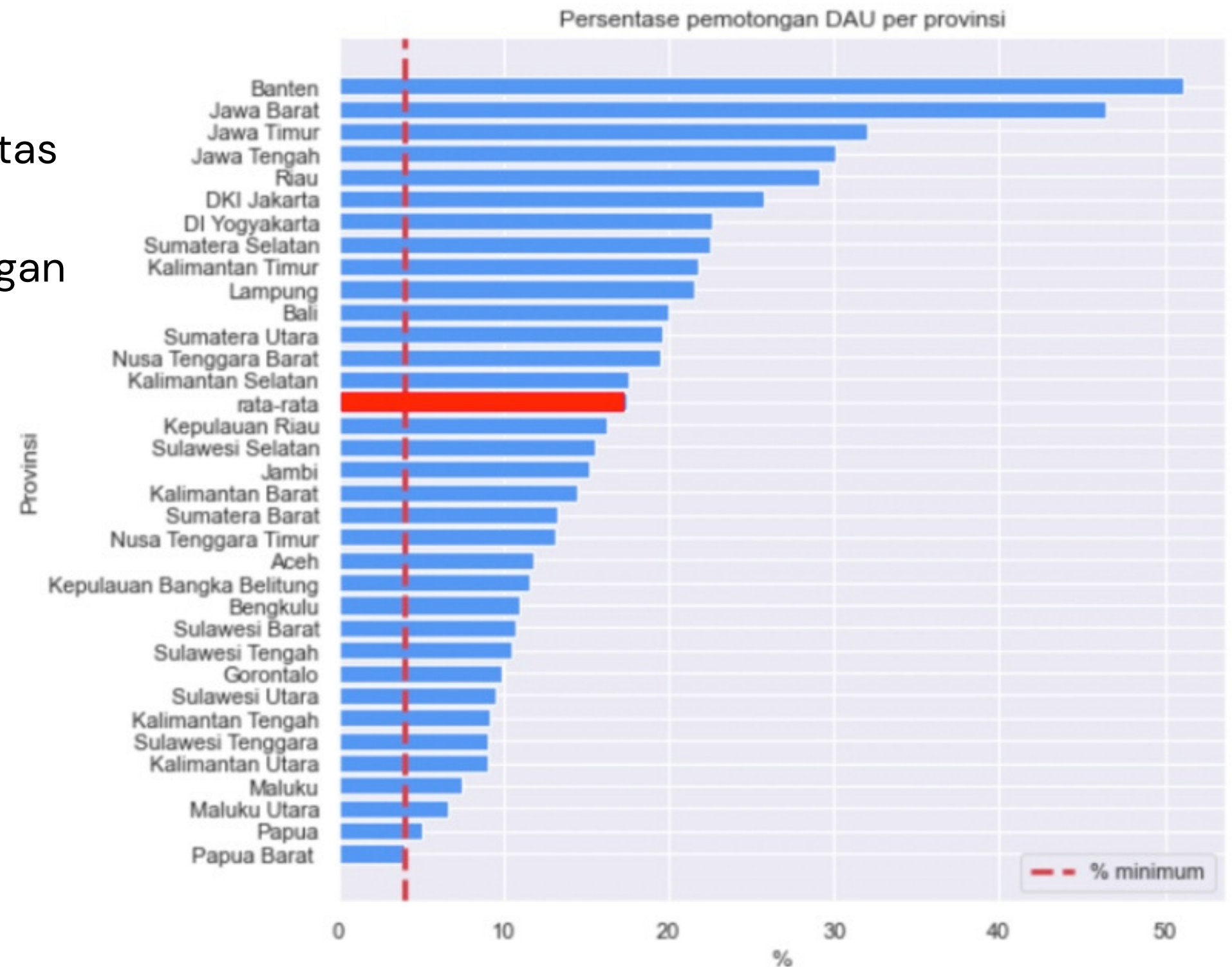
**3** Menentukan persen earmarking DAU atau DBH berdasarkan DAU tahun 2021 untuk tiap provinsi di Indonesia



# Hasil

1 Provinsi-provinsi dengan ketergantungan di atas rata-rata pada dana pusat di TA 2020 (data paling akhir di situs web DJPK) akan mirip dengan realisasi APBD TA 2018

2 Tanpa memperhitungkan biaya distribusi, penyimpanan, dan tenaga kesehatan, hanya Papua Barat saja yang bisa meng-cover penduduknya dengan pemotongan mendekati minimum (4%)



# Hasil (2)

- 3** Daerah-daerah yang lebih "independen" perlu pemotongan anggaran lebih besar
- %DAU lebih kecil
  - Jumlah penduduk lebih banyak

- 4** Perlu dibuka "sekat" antar provinsi supaya tiap provinsi dapat saling subsidi silang.

- 5** Adanya PMK No. 35/2020 tentang kriteria penyusunan APBD sudah tepat
- Perlu ada rasionalisasi belanja barang dan jasa
  - Perlu adanya pengalihan dana untuk penanganan Covid-19 di daerah masing-masing



# Simpulan

- 1 Hanya provinsi Papua Barat saja yang dapat dipotong mendekati batas minimum 4%. Perlu dibuka "sekat" antar provinsi supaya tiap provinsi dapat saling subsidi silang.
- 2 Perlu dilihat lebih jauh independensi provinsi terhadap pusat pasca banyaknya insentif pajak (pendapatan asli daerah menjadi berkurang)
- 3 Sejalan dengan PMK No. 35/2020, perlu adanya rasionalisasi belanja daerah guna membantu pemerintah pusat menciptakan kekebalan kelompok bagi satu Indonesia



**"APBD  
jangan  
diecer-ecer"**

Jokowi ke Bupati: Anggaran Negara Sedang  
Guncang, APBD Jangan Diecer-ecer!

Jokowi mendesak para bupati untuk membuat skala prioritas  
dalam menyusun APBD



*Presiden Joko Widodo dalam Ratas Laporan Komite Penanganan Covid/19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka,*

**Joko Widodo**

Presiden Republik Indonesia

Sumber gambar dan perita: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210326/9/1372879/jokowi-ke-bupati-anggaran-negara-sedang-guncang-apbd-jangan-diecer-ecer>